

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING MELALUI DANA DESA
(STUDY DI DESA GUNUNGLURAH, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS)**

Diana Damayanti^{1*}

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

*Email : diana.damayanti@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Penurunan stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Stunting penting untuk segera diatasi karena dampaknya bersifat multisektoral. Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan penanggulangan masalah stunting yang melibatkan 23 Kementerian/lembaga. Termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui alokasi dana desa. Dana transfer desa didorong menjadi salah satu potensi dalam Program Penurunan Stunting. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Buku Saku Desa (2018) dalam Penanganan Stunting yang memuat potensi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dialokasikan dalam APBDes dan dibiayai dengan Dana Desa sebagai upaya penanganan stunting. Gununglurah menjadi desa dengan kasus stunting yang sangat tinggi di tahun 2019, yakni mencapai 200 kasus atau 32,52 persen (Desa dengan jumlah stunting terbesar di Kab. Banyumas tahun 2019). Padahal, desa Gununglurah merupakan salah satu lokus prioritas penurunan stunting semenjak tahun 2018. Masih tingginya kasus stunting di Desa Gununglurah menunjukkan gejala belum optimalnya Implementasi Program Penurunan Stunting.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek kepatuhan dan aspek faktual. Selanjutnya, aspek-aspek yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan upaya analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes Namun, dari aspek Faktual, pemerintah desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Stunting

Abstract

Stunting reduction is one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). Stunting is important to overcome immediately because the impact is multisectoral. The Indonesian government is making efforts to accelerate the response to stunting problems involving 23 ministries / agencies. Including the Ministry of Villages, Development of Underdeveloped Regions and Transmigration through the allocation of village funds. Village transfer funds are encouraged to be one of the potentials in the Stunting Reduction Program. The PDPT Village Ministry published the Village Pocket Book (2018) in Handling Stunting which contains the potential or activities that can be allocated in the APBDes and financed with the Village Fund as an effort to handle stunting. Gununglurah is a village with a very high number of stunting cases in 2019, reaching 200 cases or 32.52 percent (The village with the largest number of stunting in Banyumas Regency in 2019). In fact, Gununglurah village has been one of the priority locus for stunting reduction since 2018. The still high number of stunting cases in Gununglurah Village shows symptoms of not yet optimal implementation of the Stunting Reduction Program.

This study aims to discuss the implementation of the Stunting Reduction Program through the Village Fund and to determine the factors that influence the implementation of the policy in Gununglurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The implementation of the policy is seen from the compliance and factual aspects. Furthermore, the aspects used to see the factors that influence implementation include communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The research was conducted using qualitative research methods. Data collection was carried out by interview, observation and documentation. Meanwhile, data analysis efforts were carried out using interactive analysis models from Miles, Huberman, and Saldana.

The results showed that the Gununglurah Village Government as the implementor of the Stunting Reduction Program through the Village Fund did not fully understand the policy. From the compliance aspect, the Gununglurah village government has indeed arranged and implemented villagescale activities that are relevant to efforts to reduce stunting through the APBDes. However, from the factual aspect, the Gununglurah village government tends to only comply with and carry out the activities recommended by the Village Pocket Book in Reducing Stunting without looking further at what activities or programs are actually needed most and need to be prioritized to accelerate stunting reduction in Gununglurah Village. From the research it can be concluded that factors of communication, resources, position and structure of the bureaucracy influence have not worked well in the implementation of the Stunting Reduction Program through village funds in Gununglurah, so that the implementation process is not yet optimal.

Keyword : *Public Policy, Public Policy Implementation , Village funds, Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting atau kerdil merupakan kondisi ketika balita berusia 0-59 bulan, memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (TB/U). Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua dari standar deviasi median standard pertumbuhan anak yang ditetapkan WHO. Stunting penting untuk segera diatasi karena dampaknya bersifat multisektoral. Penurunan stunting

merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Stunting penting untuk segera diatasi karena dampaknya bersifat multisektoral. Meski Angka Stunting di Indonesia telah berhasil diturunkan hampir 10% dari angka 37,2 % di tahun 2013 menjadi 27,7% di tahun 2019, angka ini masih jauh dari standard WHO untuk mewujudkan prevalensi stunting menjadi di bawah 20%.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan penanggulangan masalah stunting yang melibatkan Kementerian/lembaga. Termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui alokasi dana desa. Dana transfer desa didorong menjadi salah satu potensi dalam Program Penurunan Stunting. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Buku Saku Desa (2018) dalam Penanganan Stunting yang memuat potensi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dialokasikan dalam APBDes dan dibiayai dengan Dana Desa sebagai upaya penanganan stunting.

Desa Gununglurah adalah salah satu desa di Kecamatan Cilongok dengan jumlah penduduk sebanyak 7947 jiwa. Gununglurah juga menjadi desa dengan kasus stunting yang sangat tinggi di tahun 2019, yakni mencapai 200 kasus atau 32,52 persen (Desa dengan jumlah stunting terbesar di Kab. Banyumas tahun 2019). Padahal, desa Gununglurah merupakan salah satu lokus prioritas penurunan stunting semenjak tahun 2018. Masih tingginya kasus stunting di Desa Gununglurah menunjukkan gejala belum optimalnya Implementasi Program Penurunan Stunting.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Afifah & Yuningsih, 2016, hal. 336) pengertian kebijakan publik adalah "*whatever government choose to do or not to do*". Yaitu, pilihan apa pun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu. Sementara Rian Nugroho dalam (Afifah & Yuningsih, 2016, hal. 336) memberikan pengertian kebijakan (policy) sebagai *An authoritative decision. Decision made by the one hold the authority, formal and informal*. Dan pengertian publik yaitu kelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Maka, publik tidak berarti umum, rakyat, masyarakat atau sekedar stakeholder namun *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Sehingga kebijakan publik adalah *any state of or Government (as the hold of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mition of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)*.

James Anderson dalam Islamy sebagaimana dikutip dari (Ramdhani & Ramdhani, 2017) memberikan pengertian kebijakan "*A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*", yaitu "Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan seorang pelaku atau sekelompok pelaku, untuk memecahkan suatu masalah/persoalan tertentu". Iskandar, dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hal. 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, secara sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang-bidang tertentu dan mengarah pada suatu tujuan tertentu. Sementara pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas atau kegiatan program dalam rangka melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok, pemerintah, masyarakat atau swasta dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan akan mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Maka, kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan para pihak sebagai tahapan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Rohman dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hal. 1) menyebutkan kebijakan publik muncul atas dasar kebutuhan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan ditetapkan oleh pihak-pihak (*stakeholder*), terutama pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga pelaksanaan dari kebijakan

publik juga dimaknai dengan suatu aktivitas yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tepat atau tidaknya kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dan dapat dilihat keberhasilannya dari dampak yang ditimbulkan sebagai evaluasi atau pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi oleh para ahli, kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara atau administrasi publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah; b) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administrasi publik; c) Dikatakan atau disebut sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya (Sirajuddin, 2014, hal. 3).

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Umar, 2017, hal. 2-3) memberi pengertian mengenai proses implementasi sebagai *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"*. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan tersebut merupakan upaya mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Dari pengertian tersebut maka fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Menurut Edward III (Akib, 2010, hal. 1), keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan publik.

Menurut Islamy (Prasetia, Utha, & Larisu, 2019, hal. 30-31) Implementasi adalah tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik. Sebagai suatu sistem dan proses, kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil dan dampak jika tidak diimplementasikan, atau implementasinya tidak dilakukan dengan baik. Maka, sesudah kebijakan diadopsi para pembuat kebijakan, perhatian penuh perlu diarahkan pada bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Edward III menyatakan bahwa makna yang paling umum dari implementasi adalah melaksanakan, mencapai, memenuhi, menghasilkan atau menuntaskan. Istilah implementasi selalu disandingkan dengan kebijakan, yang berarti bahwa yang diimplementasikan adalah kebijakan. Jones juga menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh yang berwenang harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. (Prasetia, Utha, & Larisu, 2019, hal. 30-31).

Menurut Grindle (Akib, 2010, hal. 2) implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menjadi penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi bertugas membentuk ikatan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Menurut Van Meter dan van Horn implementasi harus membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Akib, 2010, hal. 2).

Purwanto dan Sulistyastuti (Ramadani, 2019, hal. 6) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mendistribusi keluaran kebijakan (*to deliver*

policy output) oleh implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Harapannya, tujuan kebijakan dapat terwujud ketika *policy output* sudah diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan mampu diwujudkan. Menurut T. B. Smith, setelah kebijakan dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sebisa mungkin harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Maka, tujuan implementasi kebijakan perlu diformulasikan dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai, kemudian program dilaksanakan sesuai dengan rencana. (Akib, 2010, hal. 3).

Ripley dan Franklin (Akib, 2010, hal. 6) memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: 1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan 2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Sedangkan perspektif faktual mengasumsikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor perlu lebih leluasa melakukan penyesuaian. Sehingga, kepatuhan pelaksana terhadap atasan perlu ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Menurut Grindle (Akib, 2010, hal. 6-7), kedua perspektif yang diperkenalkan Ripley dan Franklin tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor nonorganisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor nonorganisasional, atau pendekatan faktual.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran. Sebagaimana pendapat Ripley dan Franklin 1986: 12 dalam (Akib, 2010, hal. 3) keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang; (2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta; (3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Menurut Goggin,dkk dalam (Akib, 2010, hal. 3), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) Dorongan dan paksaan pada tingkat federal; (2) Kapasitas pusat/negara; (3) Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: a) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubungan antara pelaksana dengan struktur birokrasi yang ada, dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat (Akib, 2010, hal. 4).

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir, 1980 dalam (Akib, 2010, hal. 4) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Begitu pentingnya dimensi implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa : i) mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan; ii) keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan; iii) jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya: (1) Para implementor akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan; (2) Mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan; (3) Para implementor kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top management dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan. (Kadji, 2015, hal. 50). Edwards III (1980) dalam (Kadji, 2015, hal. 63) mengemukakan bahwa: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*”.

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Edward III tersebut penulis anggap sebagai model yang paling sederhana dan mudah untuk menganalisis Implementasi Program Penurunan Stunting di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagaimana model Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Publik

Edwards III mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi (Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Ramadani, 2019, hal. 6).

1) Communication (Komunikasi)

Secara umum Edwards III dalam (Akib, 2010, hal. 5) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan

kejelasan (*clarity*). Persyaratan pertama tentang transmisi dalam komunikasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada orang yang tepat sebelum keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kedua mengenai konsistensi, implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, jika perintah-perintah pelaksanaannya selalu konsisten. Ketiga mengenai kejelasan, program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila dikomunikasikan dengan jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Maka faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Merupakan prasyarat bahwa pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik (Kadji, 2015, hal. 65).

Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan. Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Kedua, komunikasi non formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi. (Kadji, 2015, hal. 65)

2) Sumber daya

Edwards III dalam (Kadji, 2015, hal. 66) menjelaskan sumber daya yang penting antara lain adalah jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima tidak akan dilaksanakan, dan aturanaturan yang masuk akal pun tidak akan disusun dengan sebaik-baiknya (Kadji, 2015, hal. 67).

Afandi & Warjio dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hal. 6) juga menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Sumberdaya dalam implementasi kebijakan diantaranya staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksanaanya kekurangan sumberdaya yang diperlukan, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan efektif. Tanpa adanya dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat

diwujudkan dan tidak dapat memberikan pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

3) Disposisi

Edwards III dalam (Kadji, 2015, hal. 67) menjelaskan bahwa supaya implementasi kebijakan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan.

Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka. Terkadang para implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya, pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugastugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan. (Kadji, 2015, hal. 67-68)

4) Struktur Birokrasi

Edwards III dalam (Kadji, 2015, hal. 68) menjelaskan bahwa meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Di sisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakankebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakankebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakantindakan yang tidak dikehendaki.

Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan. Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi

kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik (Kadji, 2015, hal. 68-69).

Menurut Winarno dalam (Ramadani, 2019, hal. 7). Birokrasi merupakan salah satu organisasi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana sebuah kebijakan. Birokrasi memiliki struktur yang dibuat untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan masyarakat. Ada dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut SOP dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerja. Sedangkan fragmentasi berasal terutama dari tekanan di luar birokrasi, seperti legislatif, kelompok kepentingan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi sifat kebijakan birokrasi pemerintah. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan berkaitan dengan struktur organisasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operation Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi. (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hal. 5)

Dari uraian tinjauan pustaka di atas, penulis menganalisis Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan upaya analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program penurunan stunting melalui dana desa di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan baik. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang desa. Pemerintah Desa Gununglurah tercatat telah banyak mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Namun, masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan dan belum mendapatkan dukungan dana desa diantaranya adalah kegiatan pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan Ibu menyusui oleh kader, serta kunjungan rumah oleh Kader untuk pemantauan pertumbuhan balita. Dari aspek Faktual, implementasi Program Penurunan Stunting dengan Dana Desa di desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting di Desa Gununglurah.

Data balita stunting yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Gununglurah dari Dinas Kesehatan dan pendataan di Posyandu tidak ditindaklanjuti dengan upaya mengidentifikasi faktor dominan penyebab balita stunting di Desa Gununglurah. Pemerintah Desa Gununglurah juga tidak memberikan dukungan dana desa untuk kegiatan kunjungan rumah bagi keluarga dengan balita stunting oleh kader. Hal ini menyebabkan pemerintah Gununglurah tidak memiliki kemampuan dalam memutuskan program atau kegiatan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mendapat dukungan dana desa agar angka stunting di Desa Gununglurah dapat diturunkan. Pertemuan rembug stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gununglurah juga tidak mengundang pihak-pihak eksternal terkait upaya penurunan stunting (seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Perguruan Tinggi, dsb) sehingga pertemuan tersebut juga tidak dapat dioptimalkan untuk mendiskusikan dan menyepakati kegiatan apa yang perlu diprioritaskan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Desa Gununglurah.

Akibatnya, pada saat Musrenbangdes Pemerintah Desa Gununglurah tidak memiliki dasar untuk memaparkan program prioritas yang perlu mendapat dukungan anggaran dana desa berdasarkan keputusan bersama atau kesepakatan dalam pertemuan Rembug Stunting. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menyusun Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting tidak memberikan rekomendasi perlunya alokasi dana desa untuk melakukan kajian awal mengenai faktor apa yang menyebabkan suatu wilayah memiliki angka balita stunting yang tinggi, sehingga pemerintah desa tidak memiliki dasar dalam menentukan Program atau intervensi yang tepat dalam upaya penurunan stunting di desa tersebut. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa di Desa Gununglurah:

Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi berpengaruh terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa. Transmisi komunikasi Program Penurunan Stunting di Desa Gununglurah belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa Perangkat desa. Gununglurah tidak tepat dalam mendefinisikan apa itu stunting meskipun mengaku telah beberapa kali mendapatkan sosialisasi dan pembekalan mengenai stunting. Selain itu, meski telah menerima dan membaca Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting, Pemerintah desa Gununglurah mengaku masih bingung program apa yang sebenarnya harus dilaksanakan agar angka stunting di Gununglurah benar-benar bisa diturunkan. Hal ini menunjukkan bahwa Masalah konsistensi mengenai kebijakan dalam mengalokasikan dana desa juga dikeluhkan oleh pemerintah desa Gununglurah. Banyaknya intruksi terkait pengalokasian dana desa membuat Pemerintah desa Gununglurah bingung dalam menentukan apa yang harus diprioritaskan dalam mengalokasikan dana desa.

Begitu pula dengan masalah kejelasan, Pemerintah desa Gununglurah berharap adanya komunikasi formal yang jelas apakah dalam bentuk surat edaran atau instruksi yang rinci, mengenai kegiatan apa dan berapa besaran dukungan yang harus dialokasikan oleh pemerintah desa agar percepatan penurunan stunting di Gununglurah dapat diwujudkan. Persoalan lain mengenai komunikasi adalah pemerintah Gununglurah jarang melibatkan pihak Puskesmas atau Dinas Kesehatan pada saat Musrenbangdes, rembug stunting maupun pertemuan lain yang membahas mengenai stunting di desa Gununglurah. Hanya bidan desa yang diundang dalam kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tidak ada masukan dari pihak Puskesmas atau Dinas Kesehatan atau lintas sektor lain yang dapat dijadikan penguat untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan penurunan stunting.

Faktor Sumberdaya

Faktor Sumberdaya berpengaruh pada Implementasi Program Penurunan stunting melalui Dana Desa. Dari segi ketersediaan informasi, Pemerintah Desa Gununglurah memiliki data bayi dan balita yang bersumber dari kader posyandu, bidan desa maupun

Puskesmas Cilongok 1. Akan tetapi, Pemerintah Desa Gununglurah tidak memiliki informasi yang memadai mengenai penyebab atau faktor dominan yang menyebabkan banyaknya balita stunting di Desa Gununglurah. Dari segi sumberdaya manusia, jumlah Perangkat desa Gununglurah adalah 11 (sebelas) orang, sedangkan kader (tingkat desa, RW dan RT) berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang. Meskipun secara kuantitatif cukup banyak, perangkat desa dan kader didominasi tingkat pendidikan SMP dan SMA, sebagian besar kader juga merangkap tugas sebagai kader PKK, kader KB, sekaligus kader Posyandu atau pengurus Kampung KB. Sehingga, meskipun seluruh perangkat desa dan sebagian besar kader telah memperoleh pembekalan mengenai stunting baik dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) maupun pihak lain (Unsoed, PKK Kabupaten, dsb), pengetahuan mengenai pengertian stunting, faktor penyebab, dampak, hingga upaya pencegahan dan penanganannya belum begitu dipahami. Desa Gununglurah juga hanya memiliki 2 (dua) orang bidan desa, yang mengaku kerepotan membina seluruh Posyandu di desa Gununglurah yang jumlahnya ada 16 pos.

Dari segi penganggaran, Pemerintah Gununglurah tercatat telah memberikan dukungan anggaran untuk berbagai kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi spesifik, hanya saja kegiatan-kegiatan tersebut hanya sekedar mengikuti rekomendasi yang tertulis pada Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting tanpa disesuaikan dengan kegiatan apa yang semestinya menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan dana desa sehingga penurunan stunting di Desa Gununglurah benar-benar dapat diwujudkan. Faktor sumberdaya baik informasi, sumberdaya manusia maupun penganggaran yang belum optimal di Desa Gununglurah menyebabkan Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa di Desa Gununglurah belum berjalan dengan baik.

Faktor Disposisi.

Faktor Disposisi berpengaruh pada Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa. Dari segi sikap, Pemerintah desa Gununglurah mengaku sangat mendukung upaya penurunan stunting melalui dana desa dan menganggap bahwa upaya mempercepat penanganan stunting melalui dana desa harus dilaksanakan. Namun, Pemerintah Desa Gununglurah juga mengaku belum bisa mewujudkannya secara optimal. Meski Pemerintah Gununglurah mencoba menunjukkan komitmennya dengan menganggarkan kegiatan-kegiatan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2020. Akan tetapi, pemerintah desa Gununglurah belum dapat memperlihatkan keseriusannya dalam mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab utama tingginya stunting di Gununglurah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya alokasi untuk transport atau insentif untuk dukungan kunjungan rumah kepada keluarga-keluarga yang memiliki balita stunting.

Selain itu, Pemerintah desa Gununglurah juga belum membuat tim tugas khusus untuk percepatan penurunan stunting dengan SK Kepala Desa. Pemerintah Gununglurah juga belum menunjukkan keseriusannya dengan melibatkan stakeholder stakeholder eksternal baik dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas pendidikan, Dinas KB, atau lintas sektor lain yang dapat memberikan bantuan kegiatan atau masukan ketika pertemuan rembug stunting atau Musrebangdes agar ada masukan-masukan yang benar-benar dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa Gununglurah dalam mengalokasikan anggaran pada kegiatan percepatan penurunan stunting di desa Gununglurah. Dari aspek disposisi Pemerintah Desa Gununglurah belum menunjukkan komitmennya secara optimal dalam upaya menurunkan stunting di desa Gununglurah.

Faktor Birokrasi

Faktor Birokrasi berpengaruh pada Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa. Pemerintah desa Gununglurah belum memiliki SOP khusus mengenai Program Penurunan Stunting di desa Gununglurah. Selain itu, Pemerintah Gununglurah juga belum membentuk tim khusus dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa Gununglurah. Koordinasi Pemerintah Desa Gununglurah dengan stakeholder yang menangani persoalan stunting belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari belum

dilibatkannya stakeholder eksternal pada pertemuan rembug stunting maupun Musrenbangdes. Meskipun demikian, Pemerintah desa Gununglurah dinilai sangat terbuka terhadap masukan dari Bidan desa maupun Kader kesehatan menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan dukungan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya penurunan stunting.

Tidak adanya SOP, tidak dibentuknya Tim Khusus dan tidak adanya koordinasi yang melibatkan lintas sektor menunjukkan bahwa secara birokrasi upaya penurunan stunting di desa Gununglurah tidak optimal sehingga menyebabkan Implementasi Program Penurunan Stunting di Desa Gununglurah tidak berjalan dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dapat menjelaskan mengapa Implementasi program penurunan stunting di Desa Gununglurah yang sudah berjalan sejak tahun 2018 belum berhasil menurunkan angka stunting di desa Gununglurah. Sebagaimana diungkapkan oleh Edward III, faktor komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor tersebut belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes. Namun, dari aspek Faktual, pemerintah desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa. Faktor komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 2*, 330-360. Dipetik Januari 28, 2020, dari <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10007>.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1*, 1-11. Dipetik Januari 28, 2020, dari <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/289>.
- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Kesehatan, Volume 45*(Edisi 4), 234-240. Diambil kembali dari <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/view/7465/5434>.
- BKKBN. (2018). Upaya Mencegah dan Menanggulangi Stunting : dari Istana sampai Rumah Tangga. *Jurnal Keluarga, Edisi ke-1*, 12-15. Diambil kembali dari

<https://cis.bkkbn.go.id/adpin/download/jurnal-keluarga-edisi-kesatu-2018/?wpdmdl=766>.

BPS Jawa Tengah. (2019). Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2019. *Berita Statistik Resmi, No. 06/01/33/Th. XIV*. Dipetik Januari 28, 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentasependuduk-miskin-september2019-turun-menjadi-9-22persen.html>.

jateng.tribunnews.com. (2019, Desember 9). Diambil kembali dari Ada 3.865 pasangan Menikah di Bawah Umur di Jawa Tengah, Alasan Terbanyak Hamil di Luar Nikah: <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/09/ada-3865-pasanganmenikah-di-bawah-umur-dijawa-tengah-alasan-terbanyakhamil-di-luar-nikah>.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press. Diambil kembali dari <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2621/Yulianto-Kadjibuku-formulasi-danimplementasi-kebijakanpublik.pdf>.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Khoeroh, H., & Indriyanti, D. (2017). Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog. *Unnes Journal of Public Health, Volume 6*(Edisi 3), 189-195. doi: <https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11723>.

Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc.

Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya Remaja.

Prasetya, R., Utha, A., & Larisu, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bombana. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.10, No. 2*, 29-38. Dipetik Januari 28, 2020, dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/10251>.

Pusdatin Kemenkes. (2018, Oktober). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Diambil kembali dari <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>.

Puslitbang KKB BKKBN. (2019). *Laporan SKAP KKBPK tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.

Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator, Volume 15 No. 1*, 1-18. Dipetik Januari 28, 2020, dari <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-implementasi-kebijakanpengelolaan-komunikasi-publik-di-kementerian-esdm.pdf>.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Volume 11 No. 01*, 10. Dipetik Januari 28, 2020, dari <https://journal.uniga.ac.id/index.php/IPB/article/view/1/1>.

Samsudrajat, A., & Jati, S. P. (2018, April). Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang. *Jurnal*

Manajemen Kesehatan Indonesia, Volume 6(Edisi 1), 1-7. doi:
<https://doi.org/10.14710/jmki.6.1.2018.1-7>.

Satriawan, E. (2018, November 22). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Diambil kembali dari <http://www.tnp2k.go.id/>:
[http://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K Stranas 22Nov2018.pdf](http://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf).

TPN2K. (2018, April). *160 Kabupaten/Kota Prioritas Dengan Masing-masing 10 Desa Untuk Penanganan Stunting (Kerdil)*. Diambil kembali dari
[https://cegahstunting.id/wpcontent/uploads/2018/04/8.-160kab-kota-prioritas-desas-2019 FINAL rev.4-2.pdf](https://cegahstunting.id/wpcontent/uploads/2018/04/8.-160kab-kota-prioritas-desas-2019_FINAL_rev.4-2.pdf)

www.litbang.kemkes.go.id. (2019, Oktober 18). Diambil kembali dari
www.litbang.kemkes.go.id: <https://www.litbang.kemkes.go.id/menggembirakan-angkastunting-turun-31-dalamsetahun/>